

ISBN: 978-602-9461-06-0

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**Tema:**  
**Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan**



IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA (ISPI)  
*bekerjasama dengan*  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

2012



## PENGANTAR PROCEEDING

Seminar Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mengambil Tema Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan, didasari kondisi objektif berbagai persoalan pendidikan yang semakin hari semakin kompleks dan menuntut pemecahan dan penyelenggaraan yang sistemik.

Beberapa isu pendidikan yang saling mengkait dan strategik terutama menyangkut tenaga pendidik, pembiayaan, sarana dan infrastruktur, sistem evaluasi, dan yang tak kalah penting yang acapkali terlupakan adalah proses pendidikan itu sendiri.

Hal terakhir yang disebutkan menyangkut kompetensi tenaga pendidik yang harus dikembangkan secara berlanjutan mulai dari rekrutmen sampai pensiun. Ini terkait dengan bagaimana guru dididik dan dikembangkan profesionalnya.

Semua hal yang disebutkan perlu diorganisasikan ke dalam sistem manajemen nasional pendidikan yang efektif.

Seminar ini diharapkan dapat mengorganisasikan pemikiran secara utuh yang melahirkan alternatif solusi dalam sebuah Re-Desain.

Jakarta, 20 Januari 2012

Ketua Umum PP ISPI

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

## PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka proseding ini dapat diselesaikan dengan baik. Proseding ini berisi kumpulan makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) tanggal 21-22 Januari 2012 di Yogyakarta..

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam seminar adalah Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan.

Tema pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam subtema, yaitu (1) Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2) Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (3) Redesain Sistem Kurikulum (SKL, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian), (4) Sistem Pendanaan Pendidikan (5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Evaluasi Sistem Pendidikan.

Tema tersebut bertolak dari isu-isu penting yang muncul dalam dunia pendidikan. Renstra Depdiknas, misalnya, mengemukakan tiga hal yang menjadi pilar pendidikan, yaitu (1) Pemerataan dan perluasan akses, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) Penguatan tata kelola (*governance*), akuntabilitas dan pencitraan publik. Idealnya keseluruhan upaya dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu dilaksanakan dalam konteks NKRI dengan menerapkan konsep desentralisasi pendidikan.

Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai imperatif yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum, seperti yang menyangkut badan hukum pendidikan, dan gaji guru yang masuk dalam perhitungan 20% biaya pendidikan. Dalam konteks seperti itu muncul pendapat tentang perlunya melakukan redesign terhadap sistem dan desentralisasi pendidikan.

Dalam realitasnya dampak-dampak politis sangat deras merambah dunia pendidikan. Kebijakan dinilai sebagian orang bersifat sporadis, koordinasi kurang efektif, dan terjadi ketakkonsistenan dan ketakkoherenan sistem dan desentralisasi pendidikan. Semua itu berdampak luas terhadap perwujudan sistem pendidikan sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembicara kunci dalam seminar ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Prof. Dr. Mohammad Nuh. Pembicara-pembicara lain adalah para pakar tingkat nasional bidang pendidikan yang sudah banyak makan garam. Pada umumnya mereka adalah pejabat atau mantan pejabat dalam lembaga kependidikan. Pemikiran dan pengalaman mereka dituangkan dalam bentuk makalah sebagai sumbangsih dalam rangka redesign sistem pendidikan di negara kita.

Akhinrya, panitia menyampaikan terima kasih kepada nara sumber yang telah memberikan kontribusinya berupa pemikiran dan pengalaman dalam bentuk makalah. Semoga pemikiran-pemikiran itu dapat dibaca dan direnungkan untuk kemudian digunakan sebagai acuan untuk membuat desain sistem pendidikan yang lebih baik. Selamat membaca.

## DAFTAR ISI

Halaman

1 KATA PENGANTAR KETUA ISPI

2 PENDAHULUAN

3 DAFTAR ISI

1

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Soedijarto, MA*

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Dr. Fakry Gafar, M.Ed*

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Dr. Agus Dwiyanto*

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Sekolah sebagai Sarana Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan. *Oleh: Mulyono, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Optimalisasi Desentralisasi Pendidikan (Model *Integrative RegMap-Regulatory Impact Assesment* (IRR) Pembentukan Perda Pendidikan yang Berbasis Pendidikan Berkarakter Kearifan Nilai Lokal). *Oleh: Rodiyah, UNNES Semarang*

Redesain Pendidikan Kejuruan di Indonesia sebagai suatu Wacana Ke Depan. *Oleh: Badraningsih Lestari, FT UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Menengah Kejuruan: Alternatif Pengentasan Pengangguran Di Indonesia. *Oleh: Nuryadin Eko Raharjo, FT UNY*

Rekonstruksi Pendidikan dan Penguatan Modal Sosial. *Oleh: Siti Irene Astuti D, FIP UNY*

Isu-Isu Strategis Desentralisasi Pendidikan Kejuruan Indonesia. *Oleh: Dr. Putu Sudira, M.P. FT UNY*

II

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, Rektor UPI Bandung*

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Muchlas Samani, Rektor UNESA Surabaya*  
Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Sistem Manajemen Pendidikan. *Oleh: Prof. Dr. Noeng Muhadjir*

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor. *Oleh: Dr. Muh Farozin, FIP UNY*

Masa Depan Profesi Guru dalam Bingkai Sentralisasi Pendidikan (Kajian terhadap Praktik Pengembangan Profesi Guru di Daerah Pasca berlakunya UU No. 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005). *Oleh: Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd, UPI Bandung*

Studi Orientasi Tugas Pengawas dan Kepala Sekolah (Suatu Gagasan Melakukan Revitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Kepengawasan Pendidikan di Era Desentralisasi Pendidikan). *Oleh: Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd Universitas Negeri Gorontalo*

Kontra-Profesional dalam Pengadaan dan Pemberdayaan Guru. *Oleh: Udik Budi Wibowo, FIP UNY*

Memulihkan Kesemrawutan dalam Praktik Pendidikan di Sekolah. *Oleh: Abdullah Pandang, FIP UNM*

Redesign Pendidikan Calon Guru untuk Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusif. *Oleh: Pujaningsih M.Pd, FIP UNY*

Penguatan Fungsi Pengawas Sekolah dalam Kerangka Perbaikan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Oleh: Rahmania Utari, M.Pd, FIP UNY*

Model Hipotetik Jalur Karier Lulusan Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan Sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Berbagai Jenis Lembaga Pendidikan. *Oleh: Priadi Surya, M.Pd, FIP UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Guru Di LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *Oleh: M. Joko Susilo, M.Pd; Nani Aprilia, M.Pd; dan Nur Hidayah, M.Pd, UAD Yogyakarta*

Peran Guru dan Pendidikan Guru Masa Depan. *Oleh: Bambang Setiyo Hari Purwoko, FT UNY*

Guru Profesional Dan Relevansi Pendidikan. *Oleh: Taty Fauzi dan Mardiana*

Penambahan Program Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru. *Oleh: Hermanto, FIP UNY*

Model Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Melalui Pembelajaran Berbasis Kerja (*Work-Based Learning*). *Oleh: Budi Tri Siswanto, FT UNY*

# MODEL HIPOTETIK JALUR KARIER LULUSAN PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI/MANAJEMEN PENDIDIKAN SEBAGAI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI BERBAGAI JENIS LEMBAGA PENDIDIKAN

Priadi Surya, M.Pd.<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Relevansi lulusan perguruan tinggi dengan lapangan kerja selalu menjadi bahan pembahasan para ahli. Setiap program studi di perguruan tinggi diharuskan memperhatikan relevansi lulusannya dengan bidang keilmuan yang dikembangkannya. Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sejatinya menyiapkan mahasiswanya sebagai calon tenaga kependidikan sebagai pengelola pendidikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan sarjana Administrasi/Manajemen Pendidikan tersebar di berbagai bidang pekerjaan. Pekerjaan yang dapat ditekuninya masih sangat beragam, belum terfokus pada jenis profesi utama tertentu, dan peluang kerja yang tersedia masih belum jelas. Pembagian secara umum bidang pekerjaan yang ditekuni lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan adalah bidang kependidikan (sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) dan bidang nonkependidikan. Makalah ini membahas model hipotetik jalur karier lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan di bidang kependidikan. Corak program pendidikan S1 Administras/Manajemen Pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih bervariasi. Beberapa masih memberikan program pengalaman lapangan berupa praktik mengajar, beberapa yang lain sudah berupa praktik administrasi. Fakta sosial menunjukkan bahwa lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan tidak sedikit yang akhirnya menjadi guru (tenaga pendidik), bukan sebagai tenaga kependidikan. Ilmu administrasi/manajemen pendidikan dipraktikkan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah (yang sesungguhnya adalah guru), namun justru lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan diragukan kemampuannya ketika bekerja sebagai guru. Mereka bergelar Sarjana Pendidikan, masih dekat dengan dunia pengajaran jika dibandingkan dengan sarjana ilmu murni yang kemudian menjadi guru tanpa bekal ilmu pendidikan. Guru sebagai jabatan awal bagi lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan, selanjutnya menempati jabatan pengelola pendidikan yang sangat relevan dengan keilmuan mereka, yaitu menjadi wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan.

Kata kunci: jalur karier, administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Setiap alumni yang lulus dari perguruan tinggi tentu saja bercita-cita untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang dapat memberikan nafkah baginya. Pekerjaan itu dipandang sebagai karier yang akan menjadi sandaran hidup. Karier seseorang yang ditempuh itu dapat berstatus sebagai pegawai yang bekerja terhadap lembaga atau pihak lain, wirausaha sendiri tanpa mempekerjakan orang lain, atau wirausaha dengan membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Setiap tahunnya perguruan tinggi menghasilkan lulusan hingga ribuan orang. Namun belum tentu semua sarjana terserap oleh dunia kerja. Banyak lulusan yang akhirnya bekerja tidak sesuai latar belakang pendidikan. Saat ini ada 9 juta pengangguran di Indonesia dengan 50% merupakan generasi muda lulusan SMA. Sekitar 6- 7% adalah lulusan perguruan tinggi. Ganjar Kurnia (2012) mengatakan "Perguruan tinggi jadi gamang, mau dikemanakan arahnya, apakah mempersiapkan mahasiswa siap pakai alias jadi tenaga kerja terampil atau sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini masih terus kita pikirkan. Perguruan tinggi ada yang sebagai wadah pengembangan ilmu. Sedangkan, yang mempersiapkan tenaga kerja hanya ada di tingkat diploma. Namun kenyataannya mahasiswa yang masuk perguruan tinggi dengan jenjang S-1, mereka masuk ke perguruan tinggi karena ingin mendapatkan pekerjaan."<sup>2</sup>

Pembangunan bangsa di bidang pendidikan mayoritas dijalankan oleh pemerintah. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi ini lebih banyak jumlahnya berstatus PNS. Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan (AP/MP) sebagai salah satu program studi di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan, masih dalam proses penyempurnaan relevansi keilmuan dengan lapangan kerja, termasuk jalur karier yang dapat ditempuh oleh lulusannya. Harapannya mereka dapat diserap ke dalam berbagai jenis lembaga pendidikan untuk mengaktualisasikan keilmuannya mengelola pendidikan pada ruang lingkup makro dan mikro.

---

<sup>2</sup> Menyiapkan Sarjana Siap Pakai. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/456543/>. Diakses 5 Januari 2012.

Lulusan Program Studi S1 AP/MP memiliki kompetensi dalam kepemimpinan, supervisi, dan mengelola kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat, mengelola persuratan dan pengarsipan, mengelola kesiswaan, mengelola kurikulum dan mengelola organisasi atau lembaga pendidikan.

Jabatan pengelola pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas, dan atau pejabat dinas pendidikan secara tradisi ditempati oleh guru senior yang memilih karier manajerial. Kondisi tersebut terutama sekali terjadi bagi guru PNS yang bekerja di sekolah negeri, dan sebagian kecil terjadi di sekolah swasta. Jikapun lulusan S1 AP/MP ingin menjadi kepala sekolah dan pengawas untuk mempraktikkan ilmunya sebagai pengelola pendidikan, mereka harus menjadi guru terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah ilmu Administrasi/Manajemen Pendidikan tidak dijadikan bidang studi yang terdapat di sekolah-sekolah. Mereka harus memilih bidang studi yang tersedia di sekolah, dan mengajar bidang studi itu dengan kemampuan yang terbatas.

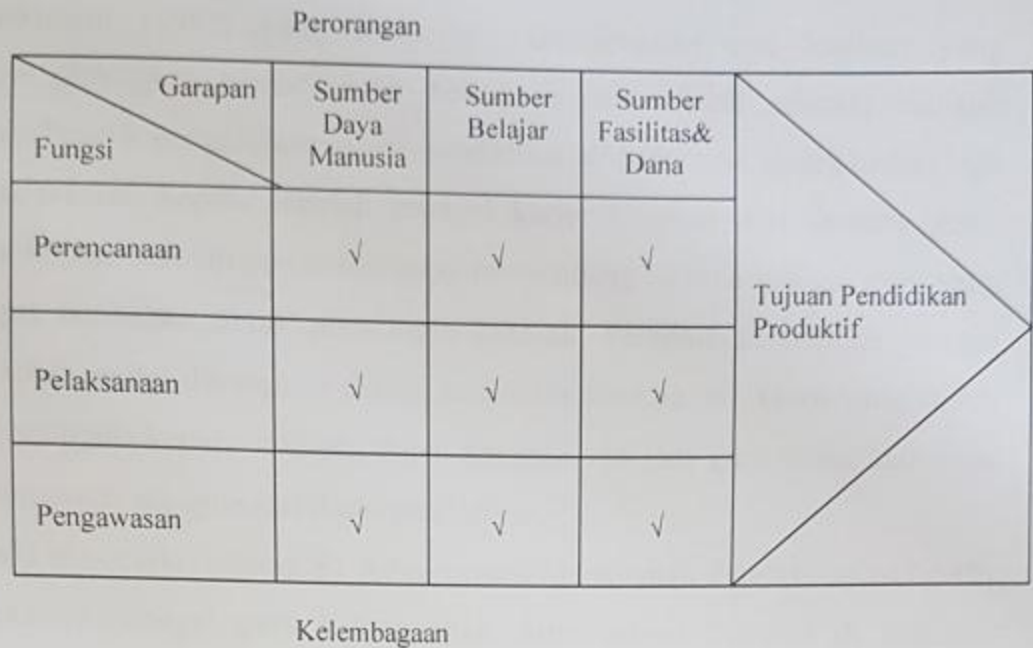
Daya serap lapangan kerja yang relevan terhadap sarjana AP/MP masih terbatas. Bahkan perlu diteliti secara serius sehingga dapat ditemukan suatu upaya penyaluran lulusan S1 AP/MP yang bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Jabatan ideal bagi mereka adalah sebagai tenaga kependidikan pengelola pendidikan. Sedikit bergeser dari jabatan ideal tersebut, mereka masih diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan lainnya dalam ruang lingkup kerja bidang kependidikan. Penulis memaparkan suatu gagasan model hipotetik jalur karier mahasiswa dan lulusan Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai jenis lembaga pendidikan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Wilayah Kerja Administrasi/Manajemen Pendidikan**

Bidang urusan administrasi/manajemen pendidikan secara mendasar dijelaskan oleh Engkoswara (2001: 2) sebagai keterpaduan antara fungsi dan wilayah kerja manajemen pendidikan.





Bagan 1: Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan (Engkoswara, 2001: 2)

Fungsi utama perilaku berorganisasi dalam bidang pendidikan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan yang menyangkut ketiga bidang garapan utama, yaitu 1) sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas peserta didik, tenaga kependidikan dan masyarakat pemakai jasa pendidikan; 2) sumber belajar, ialah alat atau rencana kegiatan yang akan dipergunakan sebagai media, di antaranya kurikulum; 3) sumber fasilitas dan dana adalah faktor pendukung yang memungkinkan pendidikan sesuai dengan harapan. Fungsi dan garapan manajemen pendidikan itu merupakan media atau perilaku berorganisasi yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara produktif baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kelembagaan. Ini mempunyai arti bahwa kriteria keberhasilan suatu manajemen pendidikan ialah produktivitas pendidikan.

## 2. Jalur Karier Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah: Guru → Kepala Sekolah → Pengawas Pendidikan

Pengelola pendidikan berasal dari guru adalah hal yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Mengutip Kate Bullock, et al. (1995) bahwa manajer pendidikan berasal dari guru. Rangkuman yang dipaparkannya didasarkan atas penelitian Hoyle dan McMahon (1986); Saran dan Trafford (1990); Eraut (1993)

dan Southworth (1993) yang memerinci keterampilan dan kualitas yang dibutuhkan oleh guru senior untuk bekerja secara efektif sebagai manajer pendidikan. Praktik pengelolaan satuan pendidikan di Indonesia secara tradisi juga tetap mendasarkan kepala sekolah sebagai karier lanjutan dari seorang guru. Pengertian kepala sekolah pun masih tetap memandang dirinya sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah. Pembatasan periode jabatan kepala sekolah mulai diterapkan dalam dasawarsa terakhir ini. Guru yang sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah, dapat kembali menjadi guru biasa atau pula menjadi pengawas ataupun staf dinas pendidikan.

Pada masa lalu, lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan (AP/MP) dapat berkarier sebagai guru bidang studi Administrasi Sekolah di Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Namun sejak tahun 1990 SPG dihapus. Selain mengajar di SPG, mereka juga dapat menjadi guru SD, SMP, SMA, ataupun SMEA. Kondisi demikian dapat dimaklumi bahwa di masa lalu pengangkatan guru menjadi Guru PNS diawali dari pengabdian sebagai guru honorer. Penerimaan mereka sebagai guru belum berbasiskan kompetensi seperti sekarang ini.

Pada era reformasi, penerimaan PNS mulai ditata berbasiskan kompetensi. Sarjana AP/MP tidak lagi leluasa dapat mendaftar sebagai guru. Jika melihat kompetensinya, maka mereka disiapkan untuk menjadi tenaga pengelola pendidikan. Jika sarjana AP/MP mengincar jabatan pengelola pendidikan seperti wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan, sudah dipastikan bahwa jalur kariernya harus dimulai dari guru. Fakta nyata ditemui ada sarjana AP/MP yang ketika lulus, menjadi guru honorer sekolah. Untuk menjadi guru PNS tidak dimungkinkan karena tidak ada kebijakan yang mendukung pengangkatan otomatis dari honorer.

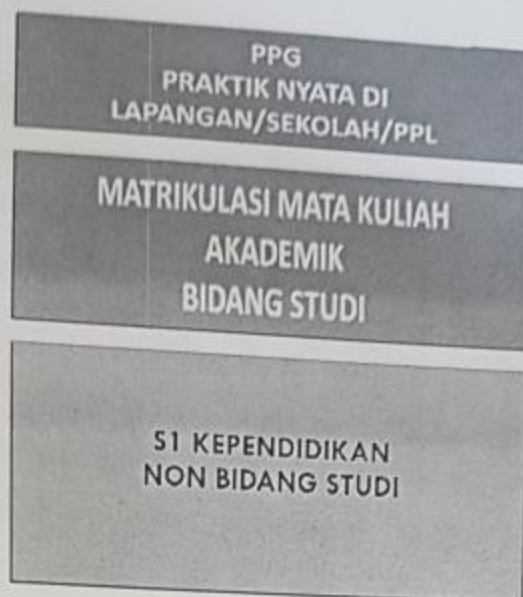
Pada program pendidikan S1 AP/MP, khususnya pada mata kuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL) atau Program Latihan Profesi (PLP) masih beragam bentuknya. Ada Program Studi S1 AP/MP di suatu perguruan tinggi yang menerapkan bentuk PPL atau PLP-nya adalah praktik mengajar di sekolah. Sedangkan di perguruan tinggi lain bukan praktik mengajar di sekolah, tetapi praktik manajerial sebagai tenaga administrasi di dinas pendidikan. Artinya masih

terdapat variasi yang mencolok bagi orientasi pekerjaan dan karier calon sarjana dan sarjana AP/MP.

Sarjana AP/MP secara akademik memiliki kompetensi untuk menempati jabatan wakil kepala sekolah, kepala sekolah dan pengawas pendidikan. Dalam keilmuannya pengelolaan pendidikan ini menjadi bahan kajian utama para sarjana AP/MP. Jalur karier ini dapat ditempuh dengan membekali sarjana AP/MP dengan kompetensi tambahan mengajar bidang studi yang menunjang kewenangan tambahannya. Misalnya, sarjana AP/MP yang akan mengajar di SMP dapat mengambil kredit tambahan/mata kuliah minor IPS, sehingga mereka dapat mengajar bidang studi IPS. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggagas kembali penambahan kompetensi sarjana pendidikan dengan kewenangan tambahan melalui program S1 KKT (S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan).

Para guru harus memiliki kompetensi alternatif yang merupakan kompetensi tambahan selain kompetensi utama. Pemilikan kompetensi tambahan dapat dilakukan melalui penambahan pendidikan akademik baik bagi mereka yang masih menempuh atau sudah lulus S1 kependidikan maupun guru dalam jabatan yang telah bersertifikat pendidik. Hal ini dapat dilakukan melalui Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (Panduan Program S1 KKT, 2011: 3). Penulis berpikir bahwa calon sarjana atau sarjana AP/MP dapat mengikuti program ini untuk membekali mereka sebelum menjadi guru di sekolah.

Tim PPG Dikti (2011) juga mengagas suatu model Pendidikan Profesi Guru bagi sarjana AP/MP dengan beban 36-40 sks, yakni program pendidikan calon guru profesional yang masukannya berasal dari S1 kependidikan yang bersifat tidak linear/tidak sesuai dan bukan bidang studi. Sebagai contoh peserta Program Pendidikan Profesi Guru SD/MI berasal dari S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, S1 Administrasi Pendidikan, dan sebagainya.



Bagan 2: Model Pendidikan Profesi Guru bagi S1 Kependidikan yang Bersifat Tidak Linear/Tidak Sesuai dan Bukan Bidang Studi. (Tim PPG Dikti, 2011: 3)

Pada sektor pendidikan swasta, jalur karier ini lebih fleksibel untuk ditempuh. Kebijakan sekolah swasta lebih leluasa untuk mengatur personil di masing-masing lembaga. Bahkan bukan tidak mungkin sarjana AP/MP yang baru lulus langsung menempati jabatan pengelola seperti wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas operasional di suatu yayasan pendidikan.

### **3. Jalur Karier Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai Tenaga Administrasi di Sekolah: Pelaksana Urusan Administrasi → Kepala Tenaga Administrasi Sekolah**

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. (Pemendiknas No. 24 Tahun 2008). Dalam keseharian mereka sering dikenal dengan sebutan bagian Tata Usaha sekolah. Secara akademik, ilmu administrasi/manajemen pendidikan merupakan program studi yang relevan dengan tuntutan pekerjaan administrasi sekolah.

Jalur karier lulusan S1 AP/MP sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah dapat dimulai dari jabatan Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian, Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan, Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan

Pengarsipan, Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan, Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum, dan Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB. Kesemua urusan yang dikerjakan oleh pelaksana urusan administrasi itu sejatinya merupakan bidang garapan dalam ilmu administrasi/manajemen pendidikan.

Mengacu kepada Pemendiknas No. 24 Tahun 2008, pelaksana urusan administrasi disyaratkan berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK. Lulusan S1 AP/MP tentu saja jauh memenuhi kriteria tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah, ketika kebijakan pemerintah meminta minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK namun di sisi lain keilmuan urusan administrasi/manajemen pendidikan secara khusus berada pada jenjang S1. Sarjana AP/MP akan bersaing dengan lulusan SMA/MA/SMK/MAK untuk menempati jabatan pelaksana urusan administrasi sekolah/madrasah. Pendidikan sarjana AP/MP tentu saja memuat landasan keilmuan sekaligus kompetensi teknis administrasi/manajemen pendidikan. Oleh karenanya secara akademik lulusan S1 AP/MP sangat kompeten untuk menempati jabatan pelaksana urusan administrasi sekolah/madrasah.

Jabatan selanjutnya dari seorang pelaksana urusan administrasi sekolah/madrasah adalah kepala tenaga administrasi sekolah. Pemendiknas No. 24 Tahun 2008 menjelaskan:

1. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB  
Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
  - b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB  
Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.

- b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB  
Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.
  - b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melihat kualifikasi pendidikan yang disyaratkan di atas, nampak bahwa lulusan S1 AP/MP dapat menempati jabatan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah setelah menempuh masa kerja minimal empat tahun sebagai tenaga administrasi.

#### **4. Jalur Karier Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai Tenaga Struktural di Lembaga/Kantor Pendidikan: Pembantu Pimpinan → Pimpinan**

Sarjana AP/MP yang bekerja pada jalur struktural ditempatkan pada Golongan III pada jabatan pembantu pimpinan. Mereka dapat mengurus bidang-bidang yang pada umumnya terdapat pada lembaga/kantor/dinas pendidikan seperti misalnya bagian tata usaha, bidang pendidikan TK, SD dan pendidikan luar biasa, bidang pendidikan menengah, bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai PNS daerah, lulusan S1 AP/MP yang bertugas di lingkungan dinas pendidikan setempat terkait dengan aturan mengenai kepegawaian daerah. Miftah Thoha (2007: 83) menjelaskan bahwa dengan berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antardaerah, dan kompetensi.

Jabatan pekerjaan dalam birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis individu dan memungkinkan pegawai untuk melihat pekerjaan mereka sebagai karier. Oleh karenanya dikenal pula istilah jabatan karier. Promosi dalam birokrasi

mungkin didasarkan pada prestasi kerja, masa kerja, atau keduanya. Kebutuhan akan keahlian teknis jelas dalam bidang pendidikan, dan sertifikasi diperlukan untuk posisi di lembaga/kantor pendidikan. Jalur karier struktural mempromosikan pegawai berdasarkan pada masa kerja dan kriteria prestasi. Promosi umumnya direkomendasikan oleh atasan langsung dan memerlukan persetujuan pada tingkat yang lebih tinggi dari birokrasi. (Anita Pankake dan Brenda R. Kallio, 2006 : 91).

### C. Kesimpulan

Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sejatinya diarahkan untuk menjadi pengelola pendidikan. Jabatan pengelola satuan pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah yang berasal dari guru. Lulusan S1 AP/MP yang ingin menjadi kepala sekolah, harus memulai karier sebagai guru. Mereka memerlukan kompetensi dan kewenangan tambahan mengenai bidang studi yang diampunya. Jenjang karier selanjutnya dari kepala sekolah adalah pengawas pendidikan. Jabatan kepala sekolah dan pengawas pendidikan sangat relevan dengan ilmu administrasi/manajemen pendidikan.

Pada jalur karier struktural, lulusan S1 AP/MP dapat dengan konsisten memulai karier sebagai pelaksana, pembantu pimpinan, dan pimpinan pada unit kerjanya. Bidang urusan administrasi yang diurusinya pada dasarnya merupakan bidang garapan administrasi/manajemen pendidikan.

Model-model jalur karier dalam makalah ini masih terbatas pada jalur linier. Pada praktiknya dimungkinkan untuk berpindah-pindah jalur karier sesuai dengan minat jabatan, formasi, dan kebijakan yang mendukung pengembangan karier lulusan S1 AP/MP.

### Daftar Pustaka

- Bullock, K. et al. (1995). *Proses Belajar Manajemen Pendidikan*. dalam Kydd, L. et al (eds). (2004). *Professional Development for Educational Management. Pengembangan Profesional untuk Manajemen Pendidikan*. Terjemahan oleh Ursula Gyani B. Jakarta: Grasindo.

- Engkoswara. (2001). *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
- Eraut, M. (1993). "The Characterisation and Development of Professional Expertise in School Management and Teaching." *Educational Management and Administration*, 21, 4.
- Hoyle, E. & A. McMahon. (1986). *The Management of Schools*. London: Kogan Page.
- Kurnia, Ganjar. (2012). Wawancara dalam *Menyiapkan Sarjana Siap Pakai*. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/456543/>. Diakses 5 Januari 2012.
- Pankake, A. and Kallio, B.R. (2006). *Bureaucracy*. In English, Fenwick W. (ed). (2006). *Encyclopedia of Educational Leadership and Administration*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
- Saran, R. & V. Trafford. (eds). (1990). *Research in Education Management and Policy*. Lewes: Falmer.
- Southworth, G. (1993). "School Leadership and School Development: Reflections from Research." *School Organisation*, 13, 1.
- Tim PPG Dikti. (2011). *Rekonstruksi Kurikulum LPTK Untuk Penyiapan Guru Profesional*. Disampaikan pada Teacher Education Summit, 14 Desember 2011 di Hotel Sahid Jakarta.
- Thoha, M. (2007). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.





**Sekretariat:**  
Program Pascasarjana  
Kampus Karangmalang Yogyakarta  
Email: [pps@uny.ac.id](mailto:pps@uny.ac.id), [kerjasama\\_pasca@yahoo.com](mailto:kerjasama_pasca@yahoo.com)  
Home page: <http://pps.uny.ac.id>

ISBN: 978-602-9481-06-0

